# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, memiliki peran penting dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, BKD Kota Solok memerlukan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan yang jelas dan terstruktur.

Bendahara Penerima yang bertugas menerima,mambukukan dan menyetor Pendapat Asli Daerah ( PAD) yang telah diterima mempunyai kewajiban untuk menyetorkannya ke kas daerah dan tidak boleh melebihi 1x24 jam setelah diterima serta mempertanggungjawabkannya

melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional dan Surat Pertanggung Jawaban SPJ Administratif di setiap bulannya.

Prosedur Penatausahaan bendahara penerimaan di Badan keuangan Daerah kota Solok biasanya terkait dengan tantangan dalam Pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Dalam era digital, banyak Daerah mulai beralih menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi. Di kota Solok, Pengenalan sistem baru mungkin memerlukan waktu adaptasi bagi bendahara, terutama mereka yang terbiasa dengan Sistem manual.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok dilakukan secara tunai dan non tunai, secra tunai si wajib pajak langsung membayar pajak kebendahara penerimaan dan secara non tunai yang dapat dilakukan dengan pemakai Qris. Semua pelaksanaan Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dalam melaksanakan pekerjaannya selalu berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku serta berdasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis dan menganggkat topik yang penulis beri judul **" PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penatausahaan penerimaan pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok?
2. Bagaimana proses penyusunan pertanggungjawaban bendahara penerima pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok?

## 1.3 Tujuan Magang

Tujuan penulisan judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi mata kuliah magang beserta salah satu syarat program studi D3 perbankan dan keuangan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).
2. Untuk meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa/i mengenai hubungan antara teori dan penerapannya, sehingga bias menjadi bekal bagi mahasiswa/i pada saat terjun langsung ke dunia kerja setelah lulus.
3. Untuk menambah informasi dan pengalaman seputar dunia kerja.
4. Untuk memahami tata cara penatausahaan penerimaan pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
5. Untuk memahami proses penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara penerimaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

## 1.4 Metode Penelitian/Observasi/Pengamatan

Dalam pelaksanaan magang penulis mengumpulkan data yang diperlukan dan menganalisisnya sesuai dengan rumusan masalah. Untuk mengumpulkan data dan menganalisis data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan
   a. Data primer, diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
   b. Data sekunder, diperoleh melalui studi pustaka, dilakukan dengan mempelajari buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini.
2. Analisis Data
   a. Studi literatur, dengan mempelajari buku-buku dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penulisan laporan magang.
   b. Studi dokumentasi, dengan mempelajari undang-undang, peraturan daerah dan keputusan pemerintah lainnya, yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat uraian yang berisi latarbelakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan secara singkat teori yang bersangkutan dengan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

BAB III : Gambaran Umum

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang tata cara penatausahaan penerimaan pendapatan, dan proses penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara penerimaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran tentang kegiatan penelitian yang penulis lakukan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA